

DS:3067-5989-1174-0121

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA- 005.04.2.309076/2025

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

Revisi ke 05
Tanggal : 03 Oktober 2025

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- 1. Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
- 2. Unit Organisasi : (04) Ditjen Badan Peradilan Agama
- 3. Provinsi : (19) SULAWESI SELATAN
- 4. Kode/Nama Satker : (309076) PENGADILAN AGAMA WATAMPONE
- Sebesar : Rp. 183.357.000 (SERATUS DELAPAN PULUH TIGA JUTA TIGA RATUS LIMA PULUH TUJUH RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

- 03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
- 03.04 PERADILAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

- 005.04.BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum
- 005.04.BF.1053 Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Jumlah Uang

Rp. 183.357.000
Rp. 183.357.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

- | | | | | | |
|-------------------------------|-----|-------------|--------------------------------|-----|---|
| 1. Rupiah Murni | Rp. | 183.357.000 | 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 2. PNB | Rp. | | - Pinjaman Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| - PNB TA Berjalan | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| | | | 5. Hibah Langsung | Rp. | 0 |
| 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Luar Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Pinjaman Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | 6. SBSN PBS | Rp. | 0 |

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- 1. KPPN WATAMPONE (055) Rp. 183.357.000

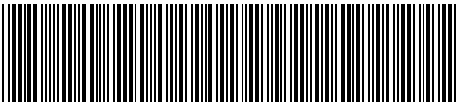
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

- 1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- 2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
- 3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- 4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- 5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- 6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- 7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 005.04.2.309076/2025
I A. INFORMASI KINERJA



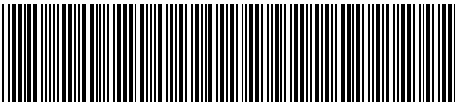
DS:3067-5989-1174-0121

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (04) Ditjen Badan Peradilan Agama
Provinsi : (19) SULAWESI SELATAN
Kode>Nama Satker : (309076) PENGADILAN AGAMA WATAMPONE

Halaman : I A. 1

Program	:	005.04.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum				183.357.000
Kegiatan	:	1053	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama				183.357.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Jumlah administrasi perkara jinayah di lingkungan peradilan agama yang diselesaikan				
		2. 01	Jumlah pelaksanaan koordinasi penyelesaian perkara perdata tepat waktu pengadilan tingkat banding di lingkungan peradilan agama				
		3. 01	Jumlah pengguna layanan pos bantuan hukum di Lingkungan Peradilan Agama				
		4. 01	Jumlah pihak berperkara yang di mediasi oleh mediator eksternal				
		5. 02	Jumlah pelaksanaan koordinasi penyelesaian perkara perdata tepat waktu tingkat pertama di lingkungan peradilan agama				
		6. 03	Jumlah pelaksanaan koordinasi pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju di lingkungan peradilan agama				
		7. 04	Jumlah pelaksanaan koordinasi penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak di lingkungan peradilan agama				
		8. 05	Jumlah pelaksanaan koordinasi pengiriman petikan/pemberitahuan isi putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak di lingkungan peradilan agama				
		9. 06	Jumlah pelaksanaan koordinasi pengiriman salinan putusan perkara jinayat tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak				
		10. 07	Jumlah pelaksanaan koordinasi putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan di lingkungan peradilan agama				
		11. 08	Jumlah pelaksanaan koordinasi penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata dilingkungan peradilan agama				
		12. 09	Jumlah pelaksanaan koordinasi perkara perdata agama di pengadilan yang menggunakan e-Court				
		13. 10	Jumlah pelaksanaan koordinasi upaya hukum banding perkara perdata agama di pengadilan yang menggunakan e-Court				
		14. 11	Jumlah pelaksanaan koordinasi penyelesaian perkara jinayat yang diimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)				
		15. 12	Jumlah pelaksanaan koordinasi terhadap layanan perkara Jinayat yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)				
		16. 13	Jumlah pelaksanaan koordinasi penyelesaian perkara melalui mediasi oleh mediator internal				
Klasifikasi Rincian Output 1	:	1053.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan	700,00	Orang		70.000.000
Rincian Output	:	01	QBA.003 Layanan Pos Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama	700.00	Orang		70.000.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 005.04.2.309076/2025
I A. INFORMASI KINERJA



DS:3067-5989-1174-0121

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (04) Ditjen Badan Peradilan Agama
Provinsi : (19) SULAWESI SELATAN
Kode>Nama Satker : (309076) PENGADILAN AGAMA WATAMPONE

Klasifikasi Rincian Output	2	:	1053.QCA	Perkara Hukum Perseorangan	331,00	Perkara, Berkas Perkara	113.357.000	
Rincian Output		:	01	QCA.001	Perkara di Lingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara	35.00	Perkara	19.250.000
			02	QCA.002	Perkara di Lingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui sidang di luar gedung	136.00	Perkara	43.707.000
			03	QCA.003	Perkara di Lingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui sidang terpadu	160.00	Perkara	50.400.000

Jakarta, 02 Desember 2024
Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama

ttd.
Drs. H. Muchlis, S.H., M.H.
NIP. 196608101993031004

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 005.04.2.309076/2025
I B. SUMBER DANA



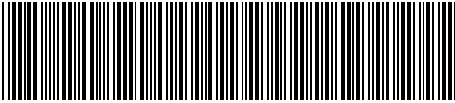
Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (04) Ditjen Badan Peradilan Agama
Provinsi : (19) SULAWESI SELATAN
Kode>Nama Satker : (309076) PENGADILAN AGAMA WATAMPONE

			Pagu		Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2025	Rp.	183.357.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0 Rp.
1. Rupiah Murni	Rp.	183.357.000		(2) RPLN	US\$	0 Rp.
2. PNPB	Rp.			b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0 Rp.
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0 Rp.
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 005.04.2.309076/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN



DS:3067-5989-1174-0121

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (04) Ditjen Badan Peradilan Agama
Provinsi : (19) SULAWESI SELATAN
Kode>Nama Satker : (309076) PENGADILAN AGAMA WATAMPONE
Kewenangan : (KD)

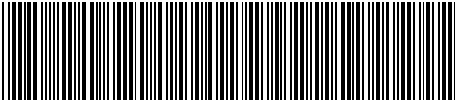
Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
309076	PENGADILAN AGAMA WATAMPONE	-	183.357	-	-	-	183.357	19 . 05	
005.04.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	-	183.357	-	-	-	183.357		
1053	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	-	183.357	-	-	-	183.357		
1053.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan (19.05 SULAWESI SELATAN / KAB. BONE)	-	70.000	-	-	-	70.000		
01 RM		-	70.000	-	-	-	70.000	055	
1053.QCA	Perkara Hukum Perseorangan (19.05 SULAWESI SELATAN / KAB. BONE)	-	113.357	-	-	-	113.357	19 . 05	
01 RM		-	113.357	-	-	-	113.357	055@	
JUMLAH		-	183.357	-	-	-	183.357		

Jakarta, 02 Desember 2024
Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama

ttd.
Drs. H. Muchlis, S.H., M.H.
NIP. 196608101993031004

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 005.04.2.309076/2025
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN



DS:3067-5989-1174-0121

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (04) Ditjen Badan Peradilan Agama
Provinsi : (19) SULAWESI SELATAN
Kode>Nama Satker : (309076) PENGADILAN AGAMA WATAMPONE

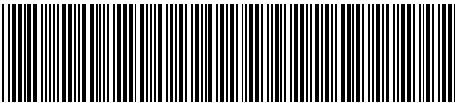
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	309076	PENGADILAN AGAMA WATAMPONE													
		RENCANA PENARIKAN DANA	10.061	18.801	5.890	10.912	15.950	8.698	29.587	18.863	5.788	14.450	19.978	24.381	183.357
		BELANJA BARANG	10.061	18.801	5.890	10.912	15.950	8.698	29.587	18.863	5.788	14.450	19.978	24.381	183.357
		Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	10.061	18.801	5.890	10.912	15.950	8.698	29.587	18.863	5.788	14.450	19.978	24.381	183.357
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	10.061	18.801	5.890	10.912	15.950	8.698	29.587	18.863	5.788	14.450	19.978	24.381	183.357
		PERKIRAAN PENERIMAAN	13.480	13.480	13.480	13.480	13.480	13.480	13.480	13.480	13.480	13.480	13.480	13.496	161.776
		- PNBP (425232)	272	272	272	272	272	272	272	272	272	272	272	278	3.270
		- PNBP (425233)	4.686	4.686	4.686	4.686	4.686	4.686	4.686	4.686	4.686	4.686	4.686	4.689	56.235
		- PNBP (425239)	8.522	8.522	8.522	8.522	8.522	8.522	8.522	8.522	8.522	8.522	8.522	8.529	102.271

Jakarta, 02 Desember 2024
Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama

ttd.
Drs. H. Muchlis, S.H., M.H.
NIP. 196608101993031004

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 005.04.2.309076/2025
IV A. B L O K I R



DS:3067-5989-1174-0121

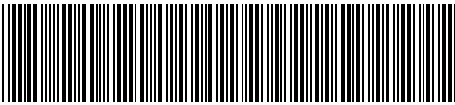
Kementerian Negara/Lembaga : [005] MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : [04] Ditjen Badan Peradilan Agama
Provinsi : [19] SULAWESI SELATAN
Kode dan Nama Satker : [309076] PENGADILAN AGAMA WATAMPONE

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
309076	PENGADILAN AGAMA WATAMPONE		
	Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan Rp. 7.875		
	52 Belanja Barang Rp. 7.875		
005.04.BF 1053	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum Peningkatan Manajemen Peradilan Agama		
1053.QCA	Perkara Hukum Perseorangan		
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 7.875		
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		

Jakarta, 02 Desember 2024
Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama

ttd.
Drs. H. Muchlis, S.H., M.H.
NIP. 196608101993031004

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 005.04.2.309076/2025
IV B. C A T A T A N



DS:3067-5989-1174-0121

Kementerian Negara/Lembaga : [005] MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : [04] Ditjen Badan Peradilan Agama
Provinsi : [19] SULAWESI SELATAN
Kode dan Nama Satker : [309076] PENGADILAN AGAMA WATAMPONE

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama

ttd.
Drs. H. Muchlis, S.H., M.H.
NIP. 196608101993031004